KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945

SABTU KLIWON

14 NOVEMBER 2026 (3 JUMADILAKIR 1960 / TAHUN LXXXII NO 49)

HARGA RP 4.000 / 12 HALAMAN

NAMANYA MASUK BURSA CAWAPRES

Sultan HB X: Itu Urusan Jakarta



Sultan HB X

YOGYA (KR) - Nama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mulai ramai diperbincangkan sebagai salah satu kandidat Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menyikapi munculnya rumor tersebut, Sultan memilih tidak mau banyak berkomentar.

Sultan HB X menegaskan, pembahasan mengenai kemungkinan dirinya masuk dalam bursa Cawapres merupakan urusan politik nasional atau pusat yang berada di luar kewenangannya. Saat dimintai tanggapan mengenai kemungkinan namanya dicalonkan sebagai Wapres, Raja Kraton Yogyakarta itu pun langsung menepisnya secara halus.

"Ya janganlah, itu urusan Jakarta, jadi bukan wewenang saya," ucap Sultan HB X menjawab pertanyaan media di Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (13/11).

Ketika ditanya seandainya pencalonan sebagai Wapres tersebut nantinya merupakan panggilan tugas negara, Sultan tetap konsisten tidak mau memberikan tanggapan lebih jauh terkait dinamika politik di tingkat pusat tersebut. "Tidaklah, saya tidak punya wewenang. Tidak mentar, tidak usah," ungkapnya.

* Bersambung hal 9 kol 5



WISATA BUNGA AMARILIS DI GUNUNGKIDUL: Wisatawan berswafoto di Kebun Bunga Amarilis di Patuk, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Jumat (13/11/2026). Bunga amarilis (Hippeastrum puniceum) yang bermekaran setahun sekali di kawasan tersebut menjadi salah satu destinasi wisata musiman dan berkontribusi memberikan pemasukan kepada masyarakat setempat.

Dibentuk Tim Verifikasi Berjumlah 36 Orang

Pemilihan dan Pelantikan Wapres, 2 Desember

KARTA (KR) - Ketua Ma- Permusyawaratan Rakyat) RI Ahmad Muzani me- kan, rapat paripurna untuk pengisian jabatan wakil presiden (wapres) dijadwalkan digelar Rabu, 2 Desember 2026.

Dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Jumat (13/11), Muzani menyebutkan, rapat paripurna MPR itu beragendakan memilih hingga mengesahkan calon wapres. "Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wapres, yakni pemilihan, pelantikan dan pengesahan calon wapres terpilih akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember, di gedung Senayan ini," ujarnya.

Jadwal rapat paripurna sebut disepakati dalam rap

* Bersambung hal 9



Analisis

Trade Off Pembangunan Ekonomi

Dr Rudy Badrudin

EMBANGUNAN ekonomi Indonesia dihadapkan pa- dilema pembangunan, yaitu dua agenda besar yang ti- selalu berjalan beriringan, yaitu antara mendorong umbuhan ekonomi dengan mewujudkan pemerataan ejahteraan. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator ting keberhasilan pembangunan karena mencer- kan peningkatan kapasitas produksi, investasi, kon- si, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, per- buhan yang tinggi belum tentu mencerminkan pening- n kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh uh lapisan masyarakat.

nsep inclusive development menempatkan kesem- n berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan dis- si manfaat pembangunan sebagai bagian integral strategi pertumbuhan. Dengan demikian, keberhasil- embangunan

* Bersambung hal 9 kol 1

DWAL ALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
u, 14 November 2026	11:26	14:45	17:40	18:53	03:49

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

PRESIDEN BERIKAN 23 BINTANG JASA

Pendidikan Anak Relawan Karhutla Dijamin



KR-Arsip/HO-BPMI Setpres

Presiden Prabowo Subianto memeluk anak perempuan Yayan Supyansuri, petugas BNPB yang gugur dalam kecelakaan helikopter saat menangani karhutla.

BOGOR (KR) - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan 23 tanda kehormatan, berupa Bintang Jasa Pratama kepada 15 relawan dan petugas yang gugur dalam penanganan bencana dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta Bintang Jasa Nararya kepada delapan orang tenaga kesehatan yang mengalami cedera di wilayah bencana.

* Bersambung hal 9 kol 1

PETINGGI PARPOL BERTEMU PRABOWO

UUD Tak Wajibkan Cawapr Dari Partai Pengusung

JAKARTA (KR) - Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menegaskan, UUD 1945 tidak w jibkan pengganti Wakil Presiden (Wapres) G Rakabuming Raka berasal dari partai politik (p pengusung.

Menurutnya, pengisian kekosongan kursi w sepenuhnya menjadi kewenangan presiden mengusulkan dua nama kandidat kepada MPR. wapres) itu harus segera diisi dan MPR tentu siap untuk menerima dua calon yang diajukan den. Tinggal presiden memilih dua nama. Masal asalnya dari mana?" kata Jimly saat ditemui us jadi narasumber diskusi publik Sosialisme I DPP PKB Jakarta, Jumat (13/11).

Ia menjelaskan, polemik yang muncul saat rakar pada perbedaan aturan antara UUD 19 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan (UU MD3). Dalam bagian penjelasan UU MI butkan, calon wapres yang diajukan presiden ha asal dari partai pengusung.

"Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai-art ajukan presiden--dan berasal dari partai peng Sedangkan ketentuan "berasal dari" itu di U Undang Dasar tidak ada," ujarnya.

* Bersambung hal

AYANAN GLOBAL ALAMI GANGGUAN

crosoft Bantah Dipicu Peretasan

ASHINGTON (KR) - Microsoft, perusahaan ologi asal Amerika Serikat (AS), memastikan bahwa guan berskala global yang terjadi kepada aplikasi rosoft Outlook, Teams, serta sejumlah layanan rosoft 365 lainnya bukan disebabkan oleh aktivitas ahaya maupun peretasan. Sejumlah pengguna di yah Amerika Utara melaporkan adanya kendala mengakses maupun menggunakan layanan rosoft 365, termasuk Teams, Outlook, dan Copilot pa- Kamis malam waktu setempat (12/11).

ami menyayangkan gangguan hari ini yang menim- an kendala bagi para pelanggan, dan kami sedang apaya mengatasi masalah tersebut. Sejauh ini, saya at memastikan tidak ada indikasi bahwa hal ini upakan akibat dari aktivitas berbahaya atau se- gan siber," kata salah satu pejabat eksekutif rosoft yang bertanggung jawab atas pengembangan kasi kecerdasan buatan (AI) Microsoft Copilot, ries Lamanna dalam pernyataannya di platform me- sosial X pada Jumat (13/11).

erusahaan menyatakan masalah tersebut juga potensi memengaruhi sejumlah pengguna di wilayah nya. Saat ini, perseroan tengah berupaya memu- kan seluruh layanan yang terdampak. Berdasarkan atan platform pemantau gangguan siber Down- tector, gangguan layanan tersebut diperkirakan telah enjangkau 74 negara dan wilayah hanya dalam kurun aktu sekitar satu jam.

* Bersambung hal 9 kol 5

VIDEO VIRAL DEMO RICUH DIDALAMI

Propam Polda DIY Periksa 11 Anggota

SLEMAN (KR) - Bidang Propam Polda DIY tengah mendalami sejumlah video viral di media sosial yang merekam dugaan tindak kekerasan oleh aparat saat pengamanan aksi 10 November 2026. Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo berkomitmen menindak tegas jika terbukti ada anggota yang melanggar.

Hal itu disampaikan Choirul Anam, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) saat jumpa pers di Mapolda DIY, Jumat (13/11) sore. "Kami juga meminta untuk itu (video viral) didalami. Kami pastikan tadi berinteraksi dengan Pak Kabid Propam, bahwa teman-teman Propam sudah mendalami video-video tersebut," ujarnya.

Video yang didalami berasal dari banyak titik, salah satunya video kericuhan di Bundaran UGM hingga video yang diklaim diambil di dalam area kampus. "Di banyak titik yang digambarkan misalnya diduga anggota kepolisian melakukan tindak kekerasan, sudah didalami. Tinggal memang setelah didalami dicocokkan ini siapa pelakunya, apakah betul anggota kepolisian atau yang lain," jelasnya.



KR- Wahyu Priyanti

Anggota Kompolnas, Choirul Anam saat memberikan keterangan pers di Mapolda DIY, Jumat (13/11/2026).

Choirul Anam mengatakan, Propam tidak hanya menonton video, tapi juga mencocokkan dengan video pembanding dari media sosial dan akan turun langsung ke lokasi kejadian. Ia meminta masyarakat dan media yang memiliki video lain agar segera melapor ke Polda DIY. "Mohon kalau ada video-video yang lain, silakan juga datang ke Polda. Bisa langsung berhubungan dengan teman-teman Propam. Sehingga kalau memang ada pelanggaran, ya ditindak," ujar Anam.

Kapolda DIY sudah memerintahkan Kabid Propam untuk bersikap tegas dan menindak jika ada indikasi pelanggaran. Sikap terbuka Polda DIY dinilai sebagai bentuk kooperatif.

* Bersambung hal 9 kol 5

SUNGG SUNGG TERJA

● BEBERAPA lalu, guru baha nesia SMA saya status bertuliska muda kok ngga tuanya bagaima nyata kalimat te jalan dengan da global yang mer 68 persen anak ngalami kecem kalt identitas d persen merasa nar-benar meng nya sendiri.(R hendra, Alam Pedan, Klaten ngah)-f

TAJUK RENCANA

Gaduh Politik

KONDISI kenegaraan kita dalam beberapa terakhir ini terasa seperti gelaran lakon dalam dunia wayang. Tepatnya, kondisi Negeri Astina menjelang perang besar Baratayuda. Dalam serial Baratayuda, Prabu Bathara Kresna menyadap, mengubah dan membocorkan sejumlah 'pasal' pakem Baratayuda, yang telah disusun para dewa. Juga ada penyingkiran dan pembinasaan sejumlah tokoh yang dianggap bisa menggagalkan perang besar keluarga Barata. Tokoh sakti Antareja dibinasakan dengan cara keji.

Sebelum Baratayuda dimulai, Kresna yang bergelar Bathara dan Prabu, kakinya berdiri di dua garis yang sama-sama menguntungkap pihak Kresna. Dengan dalih wangsit dari Dewa, Kresna merekayasa Raden Angkawijaya yang sudah beristrikan Siti Sendari agar menikahi Dewi Utari yang dikatakan merupakan Babon Ratu. Kebohongan pun muncul dari Angkawijaya ketika akan menikahi Dewi Utari. Ia mengaku masih bujang, bahkan bersumpah agar jadi banten Baratayuda, kalau ia bohong.

Akhirnya, mempunyai anak bernama Parikesit, dari hasil pernikahannya dengan Dewi Utari. Namun karena kebohongannya, Angngkawijaya atau Abimanyu benar-benar menjkadi banten dalam Baratayuda. Ia diranjap di tengah arena perang besar tersebut. Meskipun demikian, Parikesit (anak Angkawijaya hasil pernikahan dengan Dewi Utari), benar-benar menjadi raja Astina, ketika Baratayuda telah berakhir.

Pergelaran wayang adalah media hiburan yang mengandung tuntunan dan tatanan, yang mengandung nilai-nilai ajaran yang disampaikan dengan cara *medhang miring*, penuh simbol-simbol dan pesan-pesan. Bagaimana dengan kondisi kenegaraan dan kepemimpinan negeri kita saat ini? Adakah kemiripan dengan isi lakon wayang tersebut?

Beberapa waktu terakhir ini kita dicekoki gaduh ijazah Joko Widodo (Jokowi - mantan presiden) dan Gibran Rakabuming Raka (wakil presiden). Memang, tidak secara kasat mata kita tidak bisa melihat adanya kemiripan maupun perbedaan cerita dalam dunia wayang dan dunia nyata. Perlu kearifan dan kewaskitaan untuk bisa memahami dua dunia yang berbeda itu.

Setelah gaduh berkepanjangan, sampai akhirnya Gibran Rakabumi Raka menyatakan mengundurkan diri dari babatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera menggelar rapat gabungan (ragab) untuk membahas pengisian jabatan wakil presiden (wapres) usai Gibran mengundurkan diri. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, rapat gabungan MPR merupakan hasil rapat pimpinan MPR setelah menerima surat pengunduran diri Gibran.

Disebutkan, rapat gabungan membahas empat hal, yakni tanggal penyelenggaraan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wapres, menyepakati pengiriman surat dari MPR kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyetor dua nama calon pengganti, membentuk tim verifikasi berkas calon wakil presiden, serta menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf ketetapan MPR.

Waktu 14 hari pengajuan nama bakal calon wakil presiden sampai 60 hari batas akhir pengajuan calon wakil prediden, tentu akan banyak pro-kontra, adu argumen dan debat, sesua kepentingan masing-masing pihak. Dalam kurun 60 hari ini diharapkan semua pihak bisa menahan diri agar tidak menimbulkan kegaduhan masyarakat. Jangan sampai proses pemilihan calon pimpinan negara dan bangsa malah diwarnai konflik yang menimbulkan kegaduhan. ❑ **- f**

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Dr Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@krjogja.com, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank Mandiri - Rek: 1370025381365, Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
W artawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Mengisi Kursi Wakil Presiden



M Addi Fauzani

PASAL 8 ayat (2) UUD 1945, yang selama lebih dari dua dekade hanya menjadi teks di atas kertas, kini harus dijalankan untuk pertama kalinya. Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR, dan MPR segera menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan Kelompok DPD. Kursi RI-2 kini kosong, menunggu penghuni baru.

Pertanyaan publik pun bergeser: bagaimana kursi itu diisi? Bisakah Presiden menunjuk langsung? Berapa lama negara boleh berjalan tanpa Wakil Presiden? Dan siapa yang menjamin calon berikutnya tidak menyisakan persoalan yang sama?

Kursi Tak Boleh Lama Kosong

Pengunduran diri tidak menempuh jalur pemakzulan melalui DPR dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 7A dan 7B), juga tidak memerlukan persetujuan Presiden. Akibatnya seketika: kursi Wakil Presiden kosong. Persoalannya kini, berapa lama kekosongan itu boleh dibiarkan?

Sejarah pernah mencatat peristiwa serupa. Pada 1956, Mohammad Hatta mundur dari kursi Wakil Presiden dan DPR menyetujui pengunduran dirinya. Bedanya, kala itu kursi tersebut dibiarkan kosong bertahun-tahun. Setelah amendemen, konstitusi tidak lagi memberi ruang bagi kekosongan yang berlarut.

Masalahnya, baik UUD 1945 maupun UU MD3 tidak mengatur tata cara pengunduran diri Wakil Presiden. Di sinilah MPR memegang kunci. Lembaga yang melantik Wakil Presiden ini perlu menyatakan secara resmi kapan jabatan itu kosong.

Tanggal itu bukan formalitas. Ia menjadi titik awal hitungan 60 hari dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (1) UU MD3, yakni sejak kursi kosong, bukan sejak surat Presiden diterima MPR. Tafsir yang menggeser titik awal hanya memperpanjang masa kosong tanpa dasar konstitusional.



ILUSTRASI JOS

Karena itu, MPR tidak perlu menunggu batas akhir; semakin cepat kursi terisi, semakin kecil risiko yang ditanggung negara.

Saatnya Memilih Tanpa Beban

Mekanismenya jelas. Presiden mengusulkan dua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna, lalu MPR memilih satu. Presiden tidak bisa menunjuk langsung, dan MPR tidak bisa memilih di luar dua nama itu. Calon terpilih menjabat hingga 2029.

Pelajaran terpenting justru ada di tahap verifikasi. Ukurannya sebenarnya jelas: kedua calon wajib memenuhi syarat Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 169 UU Pemilu, termasuk pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Karena itu, tim verifikasi MPR harus memeriksa dokumen asli, memastikan penyetaraan ijazah dilakukan lembaga berwenang, dan mengumumkan hasilnya kepada publik. Kesalahan yang sama tidak boleh terulang.

Presiden juga sebaiknya membuka nama calon sejak awal agar publik dapat menilai rekam jejak, integritas, dan kapasitasnya. DPR pun perlu segera mengatur tata cara pengunduran diri Presiden dan Wakil Presiden dalam undang-undang, agar peristiwa serupa kelak tidak membuat negara meraba-raba.

Masyarakat pun tidak boleh sekadar menjadi penonton. Pemilihan oleh MPR memang tidak melibatkan rakyat secara langsung, tetapi rakyat berhak mengawasinya. Kampus, masyarakat sipil, media, dan warga perlu bersama-sama memantau setiap tahap: kapan kekosongan dinyatakan, siapa yang diusulkan, bagaimana verifikasi dijalankan, hingga siapa yang akhirnya dipilih. Pengawasan publik adalah cara paling sederhana memastikan konstitusi tidak hanya dibaca, tetapi juga ditaati.

Akhirnya, momentum ini menguji kesungguhan Presiden. Berbeda dengan masa pencalonan, Presiden kini tidak lagi perlu mengkhawatirkan hitungan politik untuk memenangkan pemilu. Mandat sudah di tangan. Karena itu, Presiden perlu benar-benar memilih Wakil Presiden yang memiliki kapasitas dan integritas, bukan sekadar figur yang menyenangkan partai koalisi. Kursi RI-2 terlalu penting untuk diisi dengan logika bagi-bagi kekuasaan. (*)-f

***)M Addi Fauzani**, (Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Dosen FH Univ. Islam Indonesia.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa melampirkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Ujian bagi Demokrasi



Bernardus Agus Rukiyanto

PENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden membawa persoalan yang lebih luas daripada pergantian orang. Peristiwa ini menguji kedewasaan demokrasi kita: bagaimana kekuasaan dilepaskan, bagaimana lembaga negara bekerja, dan bagaimana kepentingan rakyat dijaga ketika hubungan antarelite berubah.

Dalam demokrasi yang dewasa, jabatan dipahami sebagai amanah yang memiliki batas. Mendapatkan mandat rakyat tidak membebaskan seseorang dari pengawasan. Melepaskan jabatan pun merupakan bagian dari kehidupan konstitusional yang harus dikelola tanpa penghinaan, pengultusan, atau kegaduhan yang mengaburkan persoalan.

Karena itu, pendukung maupun pengritik Gibran perlu menempatkan peristiwa ini secara proporsional. Pengunduran diri tidak otomatis membuktikan seluruh tuduhan yang beredar. Sebaliknya, berakhirnya jabatan juga tidak menghapus kebutuhan akan pertanggungjawaban. Persoalan hukum memerlukan bukti dan proses yang berwenang, sedangkan tanggung jawab politik memerlukan penjelasan kepada masyarakat.

Kedewasaan demokrasi terlihat ketika kita sanggup mempertahankan kedua prinsip tersebut sekaligus. Hak seseorang dihormati, tetapi hak publik untuk memperoleh penjelasan tetap dijamin. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menentukan apakah suatu prosedur dianggap benar atau salah.

Guillermo O'Donnell, dalam "Accountability in New Democracies" (1998), membahas akuntabilitas horizontal dan menekankan pentingnya pengawasan antarlembaga negara. Pemilu memberikan mandat, sementara lembaga pengawas menjaga agar mandat dijalankan dalam batas kewenangan. Demokrasi melemah apabila pengawasan bergantung pada kedekatan pribadi atau berubah mengikuti kepentingan koalisi.

Pelajaran ini relevan bagi Indonesia. Kita memerlukan lembaga yang berani memeriksa ketika dukungan politik seorang pejabat masih kuat. Pengawasan yang baru bergerak setelah keseimbangan kekuasaan berubah mudah dipandang sebagai alat persaingan elite. Kepercayaan masyarakat tumbuh melalui konsistensi, bukan sekadar ketegasan sesaat.

Perhatian berikutnya tentu tertuju pada pengisian jabatan wakil presiden apabila kekosongan telah dinyatakan. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat dalam enam puluh hari.

Prosedur tersebut memberikan kewenangan sekaligus tanggung jawab. Presiden perlu menjelaskan alasan pencalonan. MPR perlu membuka pertimbangan pemilihannya. Rekam jejak, integritas, kemampuan bekerja, dan kesiapan memikul tanggung jawab kenegaraan harus menjadi bahan penilaian yang dapat diperiksa masyarakat.

Negosiasi partai merupakan kenyataan politik. Namun, masyarakat patut menolak apabila jabatan wakil presiden semata diperlakukan sebagai hadiah untuk merawat dukungan. Jabatan ini menyangkut kesinambungan pemerintahan, termasuk kemungkinan menggantikan presiden menurut ketentuan konstitusi.

Pendewasaan demokrasi juga memerlukan perbaikan prosedur. Jika muncul persoalan dalam pemeriksaan persyaratan jabatan, evaluasi harus menjangkau mekanisme verifikasi, pembagian tanggung jawab, dan penanganan keberatan. Pergantian pejabat akan kehilangan arti apabila kelemahan yang memungkinkan persoalan tersebut tetap dibiarkan.

Di tengah proses itu, pelayanan publik harus berjalan. Warga tetap membutuhkan sekolah, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kepastian penghidupan. Pemerintah berkewajiban memastikan perubahan politik tidak menghambat pekerjaan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Media dan warga juga memiliki peran. Informasi perlu diperiksa sebelum disebarkan. Kritik harus diarahkan pada keputusan dan tanggung jawab pejabat. Sikap menahan diri dari kabar yang belum teruji membantu menjaga ruang publik tetap sehat tanpa mengurangi ketajaman pengawasan.

Demokrasi Indonesia akan semakin dewasa apabila setiap perubahan kekuasaan memperkuat kebiasaan menghormati aturan. Ukurannya ialah kesediaan menerima pengawasan, keterbukaan menjelaskan keputusan, dan keberanian memperbaiki kesalahan kelembagaan. Kedewasaan itu tumbuh ketika kemenangan tidak membuat penguasa kebal kritik dan kekalahan tidak mendorong lawannya meninggalkan jalur konstitusi demi memperoleh keuntungan politik jangka pendek.

Pengunduran diri Gibran seharusnya menjadi kesempatan membangun kebiasaan tersebut. Yang perlu diwariskan dari peristiwa ini adalah standar: siapa pun yang menduduki jabatan publik tunduk pada aturan yang sama. Dengan standar itulah pergantian pemimpin dapat memperkuat kepercayaan rakyat, bukan sekadar mengubah susunan kekuasaan. **(*)-f**

***)Bernardus Agus Rukiyanto,** Dosen Universitas Sanata Dharma.*

Pojok KR

MPR memberi waktu 14 hari kepada Presiden mengajukan calon wakil presiden.
- Hindari gaduh politik.

***

Terkait penanganan kasus penyadapan, Komisi III DPR RI minta diusut dengan pasal makar.
- Sadap tidak sedap.

***

Polda DIY telah memulangkan 154 peserta aksi demo yang diamankan petugas.
- Jogja tetap damai.

Berabé